

BAB IV

KEGIATAN *International Organization for Migration* (IOM) DAN PERAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA

A. Data Kasus Perdagangan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai provinsi yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM) termasuk sejumlah kabupaten dan kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, seperti Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur serta Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan Provinsi Kalimantan Timur menjadi sasaran pencari kerja seperti dari Pulau Jawa, Jawa Barat, NTT, NTB dan Sulawesi Selatan.

Kondisi alam yang melimpah ruah itu, juga menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai surga bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya di tanah yang dijuluki Borneo. Namun, dibalik peluang usaha yang terbuka lebar, ada segelintir oknum yang memanfaatkan situasi Kalimantan Timur dengan cara menjadikan Kalimantan Timur sebagai sasaran untuk perdagangan manusia baik sekedar lewat atau perlintasan menuju Malaysia atau memang diperdagangkan di sejumlah kabupaten dan kota yang memang kaya dengan sumber daya alamnya.

Berdasarkan catatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Kalimantan Timur, trend kasus perdagangan

manusia mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, daerah tersebut mengalami

manusia tercatat pada 3 daerah yakni Kota Tarakan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, dengan korban sebanyak 6 orang. Pada tanggal 16 Februari 2011 terdapat kasus perdagangan manusia di Tarakan dengan jumlah sebanyak 3 orang dimana ketiga orang tersebut berjenis kelamin perempuan. Ketiga orang tersebut berinisial PU (17 tahun), JU (22 tahun) dan RJ (24 tahun) yang berasal dari Bandung, Jawa Barat yang kemudian dieksploitasi sebagai PSK di sebuah hotel di Tarakan.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 20 April 2011 terjadi kasus perdagangan manusia yang menelan korban sebanyak 2 orang yaitu YY dan SL. Kedua korban masing-masing berusia 15 tahun yang berasal dari Kota Samarinda yang kemudian dipekerjakan sebagai PSK di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan pada bulan Mei tahun 2011 terjadi 1 kasus yang menelan 1 orang yang berinisial NS dan berusia 16 tahun berasal dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang kemudian dipekerjakan sebagai PSK di Samarinda.

Pada tahun 2012 terjadi 7 kasus dengan daerah kejadian Kota Tarakan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Kutai Timur dengan korban sebanyak 16 orang. Sementara hingga akhir Juli 2013, kasus perdagangan manusia di Kalimantan Timur terjadi 7 kali yakni di Kabupaten Nunukan, Tarakan dan Tanjung Selor. Berikut ini adalah data korban perdagangan manusia tahun 2012 yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

Pada tanggal 14 Januari 2012, terjadi perdagangan manusia yang mana para korban sebagian besar berasal dari Garut, Provinsi Jawa Barat. Para korban

berinisial RE (15 tahun), NO (16 tahun), NUR (17 tahun), JO (19 tahun) dan TIA (23 tahun) yang dipekerjakan sebagai PSK di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur. Pada tanggal 23 Maret terdapat 2 orang korban yang berinisial SW (28 tahun) dan SN (30 tahun) yang berasal dari Bondowoso, Provinsi Jawa Timur yang dipekerjakan sebagai PSK di Kecamatan Sanga-Sanga.

Pada tanggal 4 Juli 2012 dimana korban berasal dari Manado, Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 2 orang dengan inisial GD (17 tahun) dan MW (17 tahun) yang dipekerjakan sebagai PSK di Kabupaten Nunukan. Pada tanggal 28 Juli 2012, terdapat 8 orang korban yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah yang dipekerjakan sebagai PSK di Tawau, Malaysia. Pada bulan Agustus, para korban berasal dari Kota Samarinda dengan inisial MA (14 tahun), SI (15 tahun) dan NUR (tidak diketahui usianya) kemudian dipekerjakan sebagai PSK di Muara Kembang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada bulan Oktober tahun 2012, korban berasal dari Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dipekerjakan sebagai PSK di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dengan inisial RF (17 tahun). Dan pada bulan November terdapat 8 orang korban yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan yang semuanya dipekerjakan sebagai PSK di Kabupaten Nunukan.

Namun, pada tahun ini ada perkembangan dimana korban perdagangan bukan lagi warga luar Kalimantan Timur tetapi warga Kalimantan Timur yang diperdagangkan ke luar daerah yakni Jakarta, Kuching-Malaysia dan Batam,

akhir Juli 2013 itu korban yang berhasil diselamatkan berjumlah 13 orang. Berikut ini adalah data para korban perdagangan manusia pada tahun 2013, yaitu :

Pada bulan Maret tahun 2013, para korban berasal dari Kabupaten Malinau dengan inisial ME (15 tahun), SAR (15 tahun), WIK (15 tahun) dan FIT (22 tahun) yang kemudian dipekerjakan sebagai PSK di Kabupaten Nunukan. Pada bulan April, korban dengan inisial EM (14 tahun) dan RUTH (14 tahun) yang berasal dari Malinau dan dipekerjakan sebagai PSK di Klender, Jakarta. Pada bulan Mei, korban dengan inisial LERIN (23 tahun) yang berasal dari Malaysia dipekerjakan sebagai PSK di Kuching, Malaysia.

Pada bulan Juni terjadi 3 kasus perdagangan manusia. Para korban dipekerjakan sebagai PSK di Kota Batam yang berasal dari Kota Balikpapan dengan inisial OM (53 tahun), LS (34 tahun), AM (30 tahun) dan PA (26 tahun). Kemudian korban dengan inisial TW (25 tahun) berasal dari Balikpapan mengalami penculikan dan dibawa ke Kabupaten Bulungan. Korban berasal dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan inisial ST (32 tahun) yang dipekerjakan sebagai PSK di Kota Tarakan. Dan pada bulan Juli, korban dengan inisial RO (16 tahun) yang berasal dari Probolinggi, Provinsi Jawa Tengah disekap oleh pelaku di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur selama 10 hari.

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa sebagian besar yang menjadi korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur yang kemudian dipekerjakan sebagai PSK baik di

Provinsi Kalimantan Timur hingga Malaysia. Umumnya, kasus perdagangan perempuan di Provinsi Kalimantan Timur bisa terungkap setelah adanya korban melapor, selain itu rata-rata usia korban masih muda. Kepala BPPKB Provinsi Kalimantan Timur, Ardiningsih, kasus perdagangan yang terungkap dan terdata BPPKB Provinsi Kalimantan Timur merupakan data yang sudah ditangani pihak Kepolisian Republik Indonesia.

B. Kegiatan *International Organization for Migration (IOM)* di Provinsi Kalimantan Timur

Dengan meningkatnya arus perdagangan manusia yang melintas di Indonesia telah menambah tantangan bagi Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah provinsi atau daerah hingga aparat penegak hukum. Mengingat Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas tidak sebanding dengan sumber daya manusia serta fasilitas untuk mengawasi titik-titik rawan kejahatan lintas negara di daerah perbatasan.

Sebagai sebuah organisasi antar pemerintah, IOM membantu negara-negara yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia dengan cara mendukung dan membantu dalam memastikan kelangsungan usaha dalam penanganan perdagangan manusia baik di Indonesia khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. IOM mengadakan beberapa kegiatan di berbagai provinsi di Indonesia termasuk di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh IOM di Provinsi Kalimantan Timur dalam penanganan kasus perdagangan manusia, yaitu sebagai berikut :

1. Program RMIM (*Reinforcing Management of Irregular Migration*)

Program RMIM atau Program Penguatan Penanganan Migrasi Ilegal adalah program kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Mabes Polri bersama IOM Indonesia untuk memerangi kegiatan migrasi ilegal yang termasuk kejahatan penyelundupan manusia di Indonesia.⁵⁴

Diselenggarakannya Program RMIM ini memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan kontribusi pada upaya regional yang dilakukan oleh Indonesia untuk memfokuskan migrasi gelap.
- b. Untuk memastikan perlakuan yang layak bagi para migran yang tertangkap.
- c. Memantau arus migrasi dan memberikan penanganan yang tepat waktu dan efisien terhadap para migran yang tertangkap.

Dengan diadakannya program tersebut di Balikpapan diharapkan dapat menciptakan mekanisme koordinasi yang baik dan efektif antara para instansi penegak hukum yang bertanggung jawab di tingkat daerah melalui pelatihan-

⁵⁴ "RMIM-IOM Indonesia: Newsletter" dalam website http://iom.or.id/newsletter/ind/RMIM%20Newsletter_Dec%202011_Bahasa_v3.pdf diakses pada

pelatihan yang diselenggarakan secara berkala.⁵⁵ Program RMIM ini dilaksanakan di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan diadakannya lokakarya pada bulan April tahun 2011 yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan yaitu anggota kepolisian, imigrasi, pemerintah, jaksa dan TNI.

Secara garis besar, kegiatan dari Program RMIM yang diselenggarakan di Balikpapan tersebut adalah :

- a. Dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan dan lokakarya merupakan sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan membangun mekanisme kerjasama yang efektif di antara lembaga-lembaga penegakan hukum baik di tingkat lokal.
- b. Dengan menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat akan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai migrasi ilegal dan prosedur-prosedur yang sudah ada dalam menangani dan membantu para imigran ilegal.

Berkaitan dengan lokakarya yang dilaksanakan, IOM mengikutsertakan jaksa baik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) mengingat peran penting dari pihak Kejaksaan di Sistem Peradilan Kriminal di dalam usaha memerangi perdagangan manusia khususnya penyelundupan manusia.⁵⁶ Di bawah Program RMIM, IOM memelihara sebuah jaringan kantpr di seluruh Indonesia guna meningkatkan bantuan yang hingga saat ini diberikan di

⁵⁵ Annual Report IOM Tahun 2009 dalam website

bawah RCA. IOM terus menerus memberikan layanan perawatan dan pemeliharaan selama para migran dipertimbangkan oleh pihak UNHCR dan IOM juga memfasilitasi pemulangan secara sukarela apabila para migran tersebut memilih untuk pulang ke negara asal masing-masing. Selain itu IOM bekerjasama dalam menangani kekurangan-kekurangan yang ada dan memperkuat koordinasi antara pejabat imigrasi, kepolisian dan pemerintah daerah dengan memberikan pelatihan melalui kegiatan peningkatan kesadaran.

2. Sosialisasi Baharkam (Badan Pemeliharaan Keamanan)

IOM juga melaksanakan kegiatan Sosialisasi Baharkam pada tahun 2011 yang salah satunya juga dilaksanakan di Balikpapan pada bulan Mei. Sosialisasi Baharkam ini merupakan sosialisasi yang berdasarkan kerjasama antara pihak Polri, IOM dan AFP. Sosialisasi ini dilaksanakan karena kegiatan-kegiatan perdagangan manusia termasuk penyelundupan manusia tersebut telah membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar mulai dari ideologi, sosial budaya, politik hingga keamanan. Sehingga langkah-langkah kerjasama dalam bentuk *pre-emptive*, *preventive* dan *repressive* dari Polri beserta mitra kerjanya harus menjadi solusi utama dalam menangani masalah perdagangan manusia.⁵⁷ Sebagai organisasi internasional yang berpengalaman dalam penanganan korban perdagangan manusia, sepatutnya Provinsi Kalimantan Timur termasuk daerah-

⁵⁷ "RMIM-IOM Indonesia: Newsletter" dalam website
http://iom.or.id/newsletter/ind/RMIM%20Newsletter_Dec%202011_Bahasa_v3.pdf diakses pada

komersial, menyelamatkan dan merehabilitasi korban trafiking serta memberikan tindakan terhadap pelaku maupun pihak-pihak yang mendukung perdagangan manusia terutama perempuan dan anak” ⁵⁸

2. Sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan Perda Provinsi Kalimantan Timur No 4 Tahun 2007, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 357/K.279/2010 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual Anak Provinsi Kalimantan Timur.

3. Pembentukan gugus tugas untuk meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pencegahan serta pemberantasan perdagangan manusia. Pembentukan gugus tugas untuk menjalankan program penanganan bisa dilakukan oleh instansi terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP dan KB) sebagai instansi yang mengkoordinasi, selain itu juga ada Dinas Pendidikan yang bertugas memberikan pengetahuan seputar *trafficking* kepada pelajar, selanjutnya gugus tugas rehabilitasi menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya gugus tugas yang berkaitan dengan sosial baik itu pemulangan maupun pendataan, menjadi kewenangan Dinas Sosial, sedangkan gugus tugas yang bertanggung jawab atas proses hukum ada Kejaksaan dan Kepolisian.

⁵⁸<http://kaltimjih.com/asset/upload/pp/perda/Perda.04.2007%20ttg%20PENCEGAHAN%20DAN%20PENANGANAN%20PERDAGANGAN%20ORANG%20TERUTAMA%20PEREMPUAN%20>

4. Dikeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 86 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia dan Eksploitasi Seksual Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015.

5. Sebagai bentuk kerjasama dengan daerah lain, pada 5 Juni 2011 dilakukan kerjasama antara Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Perdagangan manusia. Kerjasama serupa juga dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepulauan Riau serta Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, ditanda-tangani kerjasama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Bupati dan Walikota se Kalimantan Timur.

Berdasarkan kasus perdagangan manusia yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, ada 3 Daerah yang masih rawan terhadap praktek perdagangan manusia yakni Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Kutai Barat. Ketiga Daerah tersebut sangat berdekatan dengan daerah transit karena perbatasan negara tetangga Malaysia. Sedangkan Kota Tarakan dan Balikpapan pun sangat rawan terhadap perdagangan manusia karena merupakan gerbang sarana transportasi udara, darat, dan laut.⁵⁹

⁵⁹ <http://kaltim.antaranews.com/berita/3079/perdagangan-manusia-rawan-di-kaltim>

Kepala BPPKBD Nunukan, Mardiah mengungkapkan kasus perdagangan manusia di Nunukan berlangsung sejak Nunukan masih berstatus kecamatan dari Kabupaten Bulungan.⁶⁰ Disebutkan, rata-rata korban perdagangan manusia enggan kembali ke Malaysia dan memilih pulang ke daerah asal. Namun, ada beberapa korban yang bertahan di Nunukan untuk mencari pekerjaan. Pemerintah Kabupaten Nunukan, setiap tahun mengalokasikan dana untuk memulangkan para korban selain itu menyiapkan petugas pendamping untuk menjamin korban selamat sampai tujuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Armalia Sari Gumelar mengakui Provinsi Kalimantan Timur rawan terjadi perdagangan manusia, pasalnya berbatasan langsung dengan Malaysia baik sisi darat atau laut. "*Kalimantan Timur merupakan daerah yang rawan terjadinya 'human trafficking' karena merupakan daerah transit melalui negara sebelah, Malaysia,*"⁶¹

Sangat memprihatinkan Menteri Linda Amalia Sari Gumelar memperkirakan ada 20 persen dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan manusia. Catatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 terjadi 79 kasus perdagangan manusia, dari jumlah tersebut terbanyak di Kabupaten Nunukan yakni 67 kasus.⁶²

⁶⁰ <http://www.korankaltim.com/nunukan-jalur-empuk-perdagangan-manusia/> diakses pada tanggal 15 September 2013

⁶¹ <http://kaltim.antaranews.com/berita/3079/perdagangan-manusia-rawan-di-kaltim> diakses pada tanggal 15 September 2013

⁶² http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1851-kalimantan-timur-lima-daerah-rawan-perdagangan-orang&catid=188-info&Itemid=248

Kabupaten Nunukan menjadi tempat yang diincar pelaku perdagangan manusia karena daerahnya langsung berbatasan dengan Tawau, Malaysia Timur yang bisa ditempuh dengan perahu atau *speed boat* sehingga mudah melakukan tindak kejahatan, disisi lain lemahnya pengawasan aparat hukum. Sementara Kota Tarakan sebagai kota yang juga berada di garis perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, mengalami perkembangan pesat semenjak digalakkannya pengeboran minyak oleh Pertamina.

Berkembangnya Kota Tarakan sebagai kota jasa dan industri, menjadikan Tarakan menjadi salah satu pintu gerbang keluar masuknya orang ke Tawau-Malaysia termasuk korban perdagangan manusia. Sri Danti, Kepala Sekretariat Gugus Tugas *Trafficking* Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan perdagangan manusia telah berkembang menjadi masalah global yang aktivitasnya didasari prinsip high profil dan low risk, sehingga perdagangan manusia menjadi cepat merebak ke seluruh penjuru dunia, masalah ini telah menimbulkan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan manusia di Kalimantan Timur, tidak cukup dengan hanya komitmen lintas sektoral. Pencegahan jauh lebih efektif dan efisien, karena untuk penanganan korban perdagangan manusia diperlukan biaya sosial ekonomi yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia yang dilengkapi dengan terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan, dan pembentukan gugus tugas nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana

perdagangan manusia merupakan modal dasar dalam usaha pencegahan terjadinya perdagangan manusia.

Sri Danti menyebutkan kejahatan *trafficking* tidak bisa diputus karena merupakan organisasi kejahatan atau sindikat yang terorganisir, bahkan antara tempat satu dengan tempat lainya pelakunya berbeda karena jaringan.⁶³ Data gugus tugas nasional pecegahan perdagangan manusia, menyebutkan di Indonesia terdapat 10 tempat yang menjadi asal para korban *trafficking*. Penyebabnya karena daerah ini mengirimkan TKI dalam jumlah besar, dan dalam pengiriman TKI ada 5 persen diantaranya merupakan praktek perdagangan manusia. Korban rata-rata dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan kota kota besar lainya.

Pembentukan gugus tugas di Kota Tarakan diharapkan dapat menyamakan persepsi antara instansi yang satu dengan lainya, yang masuk dalam gugus tugas pemberantasan *trafficking*, selain itu juga memahami permasalahan perdagangan manusia dan mendapatkan solusi strategis di dalam setiap evaluasi yang akan dilakukan setiap 3 bulan. Kasus perdagangan manusia di Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir mengkhawatirkan, jika sebelumnya hanya sebatas sebagai daerah tujuan perdagangan atau transit sebelum menuju Malaysia, namun kenyatannya pada tahun 2013 sudah ada kasus warga Kalimantan Timur yang diperdagangkan ke daerah lain dalam wilayah Indonesia.

⁶³ <http://www.korankaltim.com/human-trafficking-iadi-ancaman-serius/> diakses pada

Berdasarkan data tersebut, ditambah trend kasus perdagangan manusia di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat. Tentu saja tidak bisa lagi hanya sebatas kerjasama dengan pemerintah pusat atau antar pemerintah daerah namun sudah harus melibatkan berbagai kalangan baik nasional maupun internasional diantaranya IOM yang visi dan misinya lebih peduli dan berkeadilan dalam penanganan kasus perdagangan manusia.